

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variable yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Bagian selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan mengenai model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan. Dalam menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia, berdasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga dapat mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

2.1.1 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Formal

Menurut Sudarsono (1991), tenaga kerja merupakan manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi yang meliputi keadaan fisik jasmani, keahlian-keahlian, kemampuan untuk berfikir yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum.

Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur diantaranya setiap orang yang bekerja termasuk dalam angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja harus bekerja dan mereka menerima imbalan atas jasa atau hasil kerja mereka. Pada umumnya secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia, sehingga orang dalam usia kerja dapat bekerja.

Secara umum, tenaga kerja atau *man power* merujuk pada penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15-64 tahun, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka dapat terlibat dalam aktivitas kerja apabila ada permintaan terhadap tenaga mereka (Mulyadi, 2003). Usia yang dimaksud tersebut umumnya usia siap bekerja dan usia yang masih mampu melakukan pekerjaan. Dengan demikian tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi kegiatan produktif.

Tenaga kerja dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan pendidikan dan tingkat keterampilannya (Trihastono & Marwiyanto, 2021):

1. Pekerja tidak terampil adalah mereka yang kurang memiliki pengetahuan pada suatu sektor tertentu dan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
2. Pekerja terampil, atau pekerja yang memiliki pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja yang relevan; contoh buruh ini antara lain tukang kayu, tukang reparasi televisi dan radio, serta mekanik.
3. Tenaga kerja terdidik, yang mencakup para profesional dengan gelar tinggi dan spesialis dalam disiplin ilmu khusus seperti kedokteran, akuntansi, ekonomi, dan teknik.

2.1.1.1 Teori Keynesian

Teori Keynesian dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *“The General Theory of Employment, Interest, and Money”* pada tahun 1936. Teori ini menekankan bahwa permintaan agregat (*aggregate demand*) merupakan faktor utama yang menentukan tingkat output dan penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Menurut Keynes (1936), pengangguran bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya upah, melainkan karena kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan perusahaan tidak mampu mempekerjakan tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu, Keynes mendorong peran aktif pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal, seperti peningkatan investasi dan pengeluaran negara, untuk mendorong permintaan agregat dan mengurangi pengangguran.

2.1.1.2 Tenaga Kerja Formal

Menurut Todaro & Smith (2006) penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai masuknya para pelaku tenaga kerja ke dalam sektor usaha atau industri karena terdapat *labor supply* dari industri atau perusahaan untuk mengemban tujuan yang dicapai seperti memproduksi output sebagai nilai tambah. Penyerapan tenaga kerja ini bergantung pada penawaran maupun permintaan akan tenaga kerja di dalam pasar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terjadi apabila adanya angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk, penduduk yang bekerja terserap dan tersebar sebagai sektor perekonomian.

Menurut Sumarsono dikutip dalam (Amani, 2018) permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu lapangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu:

1. Tingkat Upah, yaitu mengacu pada besaran gaji atau imbalan finansial yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau tenaga kerja yang mereka berikan.
2. Nilai Produksi, mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu.
3. Investasi, melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

Tenaga kerja kemudian dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan status pekerjaan menjadi dua kategori utama, yaitu tenaga kerja formal dan informal. Klasifikasi ini penting untuk memahami sejauh mana sistem ketenagakerjaan memberikan perlindungan, stabilitas, serta akses terhadap jaminan sosial dan hukum ketenagakerjaan. Tenaga kerja formal merujuk pada individu yang bekerja dengan status yang diakui secara hukum dan administratif, umumnya memiliki hubungan kerja tetap, menerima upah atau gaji tetap, serta dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan dan program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Menurut Perkins (2012) pasar tenaga kerja di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sektor Formal Perkotaan (*Urban Formal Sector*), merupakan pasar kerja yang diinginkan oleh setiap pekerja, baik pria maupun wanita. Pada pasar ini terdapat sektor pemerintah dan perusahaan besar seperti bank, perusahaan asuransi,

pabrik dan perdagangan. Salah satu alasan mengapa tingkat upahnya lebih tinggi, karena pekerja yang bekerja pada pasar tersebut sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menengah.

- b. Sektor Informal Perkotaan (*Urban Informal Sector*), yang di dalamnya terdapat perusahaan yang lebih kecil. Biasanya tempat toko dan tempat produksi berbagai jenis barang dan jasanya relatif kecil. Mereka juga harus berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar, dan terkadang mereka harus eksis pada permintaan yang tidak menguntungkan bagi sektor formal. Pada sektor ini biasanya memberikan lapangan pekerjaan bagi pekerja migran yang berasal dari desa.
- c. Pasar Kerja Pedesaan (*Rural Employment*), didominasi oleh sektor informal dan berbasis pada aktivitas pertanian dan usaha skala kecil.

International Labour Organization (2024) menekankan bahwa pekerjaan formal ditandai dengan kepastian kerja, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, dan akses terhadap perlindungan sosial. Dengan demikian, keberadaan tenaga kerja formal tidak hanya menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pasar kerja, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Mengukur kontribusi tenaga kerja formal dalam struktur ketenagakerjaan, digunakan indikator berupa persentase tenaga kerja formal. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi pekerja formal dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja. Persentase ini penting karena menjadi gambaran sejauh mana pekerjaan layak telah tersedia dan dinikmati oleh masyarakat. Menurut Badan

Pusat Statistik (2024) perhitungan persentase tenaga kerja formal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

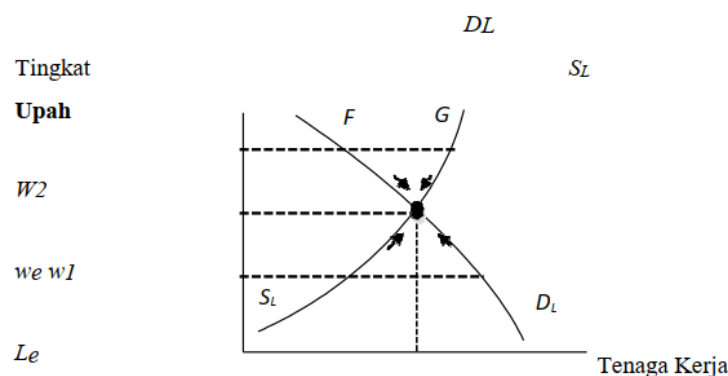
$$\text{Persentase TK Formal} = \left(\frac{\text{Jumlah TK Formal}}{\text{Total Tenaga Kerja}} \right) \times 100\%$$

Melalui rumus tersebut, dapat diketahui seberapa besar kontribusi sektor formal dalam menciptakan lapangan kerja yang terstandar dan terlindungi secara hukum. Serta, pekerja formal memiliki kualitas sumber daya manusia (pendidikan, pengalaman, kesehatan) yang lebih baik dibandingkan pekerja informal (Titiek Herwanti et al., 2021)

2.1.2 Upah Minimum Provinsi

Menurut Ricardo dalam (Deliarnov, 2009) menyatakan nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (*natural wage*). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003). Upah merupakan salah satu alat yang dapat memberikan motivasi bagi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, karena upah sendiri merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang.

Upah secara ekonomi didefinisikan sebagai jumlah yang harus diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada pekerja sebagai kompensasi atas waktu dan tenaga yang mereka habiskan untuk menyelesaikan tugas produksi (Katon Prasetyo Wibowo & Pangestuty, 2023). Menurut Rakhmawati & Boedirochminarni (2018) upah merupakan suatu imbalan yang diberikan dari perusahaan ke karyawan yang diperoleh dari hasil kerja keras yang telah dilakukan selama bekerja. Dalam teori neoklasik mengatakan bahwa upah yang di dapatkan telah sesuai dengan pertambahan hasil marginal yang diperoleh oleh karyawan tersebut (Warapsari, Hidayat & Boedirochminarni, 2021).



Sumber: Todaro (2000:326)

Gambar 2. 1 Penentuan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah: Pendekatan Pasar Bebas

Gambar 1, titik w_e melambangkan tingkat upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada w_2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni w_e . Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w_1 , jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para

pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium w_e . Kelemahan dari model pasar bebas kompetitif tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah dan lapangan kerja khususnya di negara berkembang. Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat w_e yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal tersebut maka upah yang diterima pekerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
2. Upah riil, yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008:351).

2.1.2.1 Tujuan Penetapan Upah Minimum

Tujuan penetapan upah minimum ini untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup dasar sesuai dengan standar kehidupan di daerah masing-masing. Selain itu, upah minimum juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Menurut (Marpaung et al., 2019) tujuan penetapan upah

minimum dibagi menjadi dua yaitu tujuan makro dan tujuan mikro. Tujuan makro, diantaranya:

1. Pemerataan. Kenaikan upah minimum akan mengurangi kesenjangan antara pekerja/buruh tingkat bawah dan tingkat paling atas.
2. Peningkatan daya beli pekerja/buruh. Kenaikan upah minimum secara langsung akan meningkatkan daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong ekonomi rakyat.
3. Perubahan struktur keuangan perusahaan. Kenaikan upah minimum akan memperbaiki atau merubah struktur upah terhadap struktur biaya produksi.
4. Peningkatan produktivitas. kenaikan upah minimum akan memberikan insentif bagi pekerja/buruh untuk bekerja lebih giat yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Selain tujuan makro dalam penetapan tujuan upah minimum, terdapat beberapa tujuan mikro diantaranya:

1. Sebagai jaring pengaman, agar upah minimum tidak semakin menurun.
2. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dengan upah tertinggi.
3. Meningkatkan penghasilan pekerja/buruh tingkat terendah.
4. Meningkatkan etos dan disiplin kerja.
5. Memperlancar komunikasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.

2.1.2.2 Teori Upah

Menurut Burt (1963) dalam bukunya berjudul “*Labor Market and Government Policies*” terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang memengaruhi upah pekerja, diantaranya *Wage Fund Theory*.

Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Peningkatan tabungan akan meningkatkan nilai investasi pada sektor sektor ekonomi, sehingga sektor ekonomi tersebut berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan modal menyebabkan kenaikan upah pekerja karena permintaan tenaga kerja meningkat. Teori ini juga mengungkapkan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan penurunan tingkat upah, hal tersebut karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam teori ini dijelaskan bahwa tingkat upah hanya dapat ditingkatkan dengan mengurangi penawaran tenaga kerja dan meningkatkan tabungan.

2.1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi adalah komponen kedua dalam penentuan pengeluaran agregat. Awalnya, tabungan yang berasal dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Pengeluaran tersebutlah yang dinamakan dengan investasi. Pada dasarnya investasi merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa saat ini yang harapannya dapat menambah keuntungan di masa mendatang.

Menurut (Sunariyah, 2003) investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi juga dapat dikatakan sebagai pengeluaran pemerintah dan non pemerintah (swasta), dimana membutuhkan modal riil untuk mendirikan perusahaan baru dengan hasil keuntungan mereka dan dapat memperluas usaha yang telah ada. Sehingga, dampak positifnya yaitu memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari modal awal dengan menginvestasikan modalnya tersebut (Meilasari, 2021).

2.1.3.1 Jenis Investasi

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Umumnya sumber dana investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri,

sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Salvatore Dominic (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

- 1) Investasi Portofolio (*Portfolio Investment*), yaitu investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
- 2) Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata, (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting.

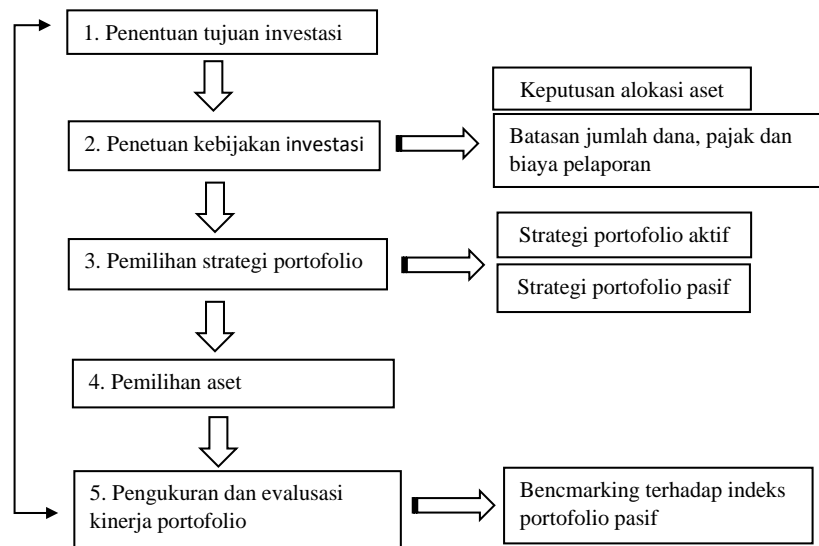
Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah aktivitas menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri pula. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pembangunan ekonomi, investasi memiliki dua peran penting, pertama peran dalam jangka pendek berupa pengaruh terhadap permintaan agregat yang akan mendorong peningkatan output

dan kesempatan kerja. Kedua, investasi menambah berbagai peralatan mesin, bangunan dan lainnya dalam jangka panjang. Maka, hal ini akan meningkatkan potensi output dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan (Mappadang, 2021).

2.1.3.2 Keputusan Investasi

Investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan bersifat jangka panjang. Bentuk dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung resiko atau ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan mempengaruhi pencapaian, tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, *opportunity cost* merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu.

Proses keputusan investasi merupakan proses yang berkesinambungan (*going process*). Menurut (Tandelilin, 2010) ada 5 tahap keputusan investasi yang berjalan terus-menerus sampai tercapai investasi yang terbaik, yaitu:



Sumber: Tandelilin, 2010:10

Gambar 2. 2 Proses Keputusan Investasi

a) Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan investasi yang akan dilakukan oleh masing-masing investor dengan tujuan berbeda-beda tergantung dari keputusan investasi yang dipilih investor.

b) Penentuan kebijakan investasi

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, real aset ataupun sekuritas luar negeri).

c) Pemilihan strategi portofolio

Strategi yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi

portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.

d) Pemilihan aset

Pada tahap pemilihan, aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah.

e) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi yang meliputi pengukuran kinerja portofolio dan perbandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking.

2.1.4 Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di seluruh wilayah pada satu periode tertentu (Astuti & Hukom 2023). Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

2.1.4.1 Pendekatan Perhitungan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diestimasikan dengan tiga pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estate
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya.

b) Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi disuatu wilayah pada jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri atas:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga.
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga.
3. Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah.
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
5. Perubahan inventori.
6. Ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum

memperolehnya (Sukirno, 2010) dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. TPT mengukur proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Secara sederhana, TPT menunjukkan seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu negara,

Secara formal, rumus untuk menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebagai berikut:

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Kondisi TPT yang relatif tinggi menandakan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia, yang bisa mengindikasikan perlambatan ekonomi, rendahnya investasi, atau ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (W. I. Astuti et al., 2017).

2.1.5.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

- a. Pengangguran Konjungtur atau Siklis (*cyclical unemployment*)

Pengangguran Konjungtur atau Siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh, adakalanya permintaan agregat lebih tinggi. Hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi dan lebih banyak pekerja baru yang dibutuhkan sehingga pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun sehingga kegiatan perekonomian mengalami kemunduran.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah negara. Meskipun demikian, pengangguran jenis ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil.

Pengangguran friksional terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Pengangguran jenis ini terjadi pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Para penganggur ini tidak memiliki pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

c. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat pergantian musim. Adanya waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari

musim yang satu ke musim lainnya. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.

Pengangguran dibagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan lama waktu kerjanya, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung (Sukirno, 1994):

a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah keadaan dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Dampak dari keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.

b. Setengah menganggur (*under unemployment*)

Setengah menganggur adalah keadaan dimana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, yang diukur dari jam kerja, produktifitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Dapat dikatakan setengah menganggur adalah orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggunya.

c. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*)

Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Pengangguran ini terdapat di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja tergantung pada beberapa faktor, yaitu besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Alvin Abdillah/Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018	PDRB, dan Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja	Inflasi, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial, Inflasi dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018.	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
2	Sapriansah Ali Nur Iksan, Zainal Arifin, M. Sri Wahyudi Suliswanto/Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	Upah Minimum Provinsi, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial UMP dan PDRB menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan investasi menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 1, Februari 2020, pp. 42-55.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Esthi Bhakti Warapsari, Wahyu Hidayat, Arfida Boedirochminarni/ Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur	PDRB, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja	Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah negatif dan tidak signifikan terhadap angkatan kerja, sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.	<i>Economie</i> , e-ISSN 2745-6366 Vol. 03, No. 1, Januari 2021
4	Desy Meilasari/ Pengaruh UMP, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri di Pulau Jawa	UMP, PDRB, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan, PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa tahun 2010-2016.	JII: Jurnal Investasi Islam Vol. 5 No. 2, 2020
5	I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha/Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum	Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif signifikan, inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013	Jurnal jurusan Ekonomi Pembangunan (Unud), Bali, Indonesia
6	Marselino Yuda Pratama, Dewi Rahmi, Ima Amaliah/ Pengaruh Investasi, UMP, dan IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020	Investasi, UMP, Penyerapan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Investasi dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa, sedangkan UMP berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa.	<i>Bandung Conference Series: Economics Studies</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Dewi M. Sabihi, Anderson G. Kumenaung, Audie O. Niode/ Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado	UMP, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP, Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 01 Juli 2021
8	Latri Wihastuti, Henny Rahmatullah/ Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa	Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi	Secara parsial menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 96 - 102
9	Jonatan Banurea/ Pengaruh PDRB, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Medan	PDRB, Investasi, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi dan UMK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Medan.	<i>Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)</i> Juli- 2022, Vol.II, No.2, hal.14-26
10	Alam Reza Berlian, dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria/Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMK, dan Tingkat Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah	Investasi, UMK, Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial PDRB dan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.	<i>Diponegoro Journal of Economics</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Azizul Lukmanul Hakim, Fadli Faturrahman, Ade Kalis Tangariano/ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017- 2020	PDRB, UMP, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil analisis menyimpulkan bahwa PDRB, IPM, dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja.	<i>Commodity</i> Vol. 1, Nomor. 1, Februari 202
12	Sang Ketut Ari Ardiawan, Made Suyana Utama/ Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	PDRB, dan Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja	Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi positif dan signifikan.	<i>Journal of Business Finance and Economic (JBFE)</i> Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
13	Yulia Pangastuti/ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah	PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tenaga Kerja	UMK, PAD, Investasi, PDRB	Secara parsial menunjukkan PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan, UMK dan PAD berpengaruh positif tidak signifikan. Namun, variabel TPT berpengaruh positif signifikan terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> 4 (2) (2015)
14	Cahyanda Nofrita, Marwan/ Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja	Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Salingka Nagari, Published by Universitas Negeri Padang
15	Adelia Silvia, Dwi Susilowati. Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa	Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks pembangunan manusia. produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Formal.

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Tenaga Kerja Formal

Upah Minimum Provinsi bertujuan untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Upah minimum dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah minimum merupakan suatu input kegiatan ekonomi. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dari perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang akan mengakibatkan perusahaan menaikkan biaya per unit barang yang di produksi (Rahayu, 2019).

Malthus merupakan salah satu tokoh ekonomi klasik, memandang bahwa upah sangat berkaitan dengan dinamika perubahan jumlah penduduk. Ia menilai bahwa populasi merupakan faktor penting dalam menjelaskan berbagai fenomena ekonomi. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka suplai tenaga kerja pun akan bertambah, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat upah. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk menurun, maka penawaran tenaga kerja juga akan berkurang sehingga mendorong kenaikan upah. Hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja bersifat dua arah, di mana peningkatan upah bisa menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain, kenaikan upah juga bisa menjadi

pendorong meningkatnya penyerapan tenaga kerja, tergantung pada kondisi dan konteks ekonominya (Pangastuti, 2015).

Menurut penelitian Azzahra et al. (2023) menyatakan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan UMP dapat mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Ketika biaya tenaga kerja menjadi terlalu mahal terhadap nilai output yang dihasilkan pekerja, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja.

Menurut penelitian Iksan et al., (2020) menyatakan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Upah berpengaruh positif dikarenakan upah dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan upah juga akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, oleh karena itu naiknya daya beli akan berdampak pada meningkatnya produksi pada perusahaan, sehingga pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Tingkat Tenaga Kerja Formal

Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Investasi memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Sehingga, dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, maka akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan per kapita. Teori Keynes menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif

terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, peningkatan investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut penelitian Wahyuni et al. (2024) menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Dengan meningkatnya investasi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa meningkatnya investasi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menanggapi permintaan para konsumen dengan meningkatkan kapasitas produksi serta meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Menurut penelitian Yuda Pratama et al., (2022) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Adanya investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi akan mendorong peningkatan penggunaan berbagai faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Selain itu, hal ini juga dapat merangsang terciptanya barang modal baru, yang pada akhirnya membuka peluang untuk menyerap faktor produksi tambahan dan menciptakan lapangan kerja baru.

2.2.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Tenaga Kerja Formal

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertujuan untuk mengukur kinerja sumber daya ekonomi serta struktur ekonomi dari suatu wilayah. Peningkatan PDRB menandakan peningkatan jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar

peningkatan penjualan yang terjadi, sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah.

Teori Keynesian menyatakan bahwa pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh pasar barang. Dalam teori ini, peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan permintaan tenaga kerja karena perusahaan memerlukan lebih banyak pekerja untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Hukum Okun juga mendukung teori ini, yang menyatakan bahwa kenaikan PDRB suatu daerah cenderung berdampak positif pada tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Warapsari et al. (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kesumawati & Fisabilillah (2024) menyatakan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PDRB memicu pertumbuhan ekonomi yang mencakup berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu, konsep Hukum Okun menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Berlian & Maria, (2023) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dan nilai PDRB naik, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga akan bertambah, karena kegiatan produksi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk mendukung proses tersebut. Dengan demikian, PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja di suatu wilayah.

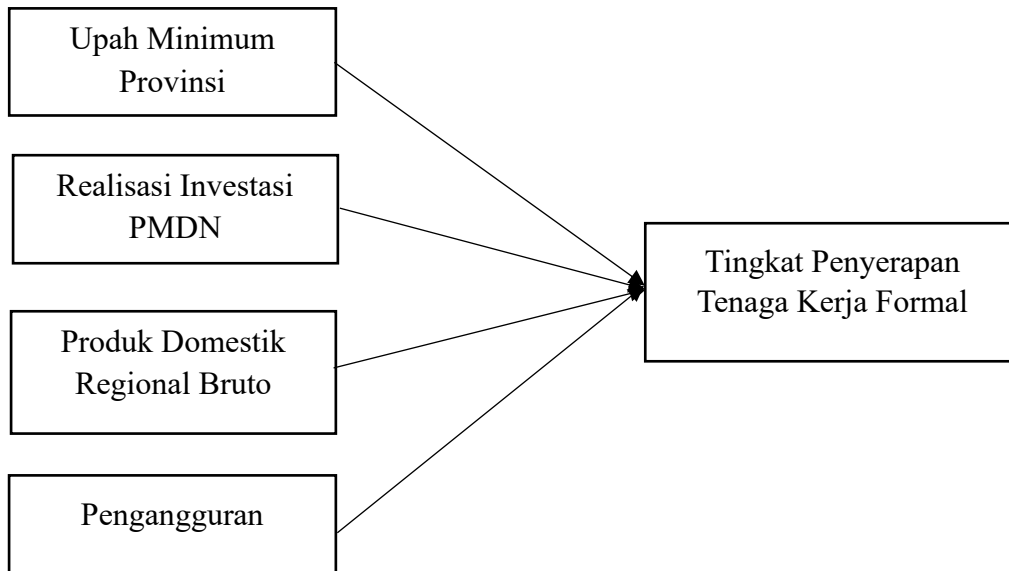
2.2.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Tenaga Kerja Formal

Pengangguran dapat diartikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran timbul karena kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para pencari kerja yang terus bertambah. Tingkat pengangguran dan kesempatan kerja sangat berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, semakin besar kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga tingkat pengangguran semakin kecil.

Teori Klasik berpandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas untuk menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran (Gilarso, 2004). Teori Klasik menyatakan bahwa jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, upah akan turun, yang mengakibatkan penurunan produksi perusahaan. Hal ini akan menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tobing & Hanifa (2024) menyatakan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi TPT, semakin besar pula indikasi bahwa pasar kerja sedang mengalami kesulitan dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Hal ini menjadi cerminan langsung dari kurangnya kesempatan kerja yang tersedia di pasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif, sedangkan Investasi Dalam Negeri dan PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia Tahun 2018-2024.

2. Diduga secara bersama-sama Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia Tahun 2018-2024.